

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT**



**TIARA ROMBE ALLO**

**1510321088**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2019**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
pada Program Studi S1 Akuntansi

**TIARA ROMBE ALLO**

**1510321088**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT**


Disusun dan diajukan oleh:

**Tiara Rombe Allo  
1510321088**

Diperiksa dan telah diuji

Makassar, 07 September 2019



Pembimbing



**Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial

Universitas Fajar



**Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA**

# SKRIPSI

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT

disusun dan diajukan oleh

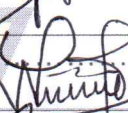
**TIARA ROMBE ALLO**

**1510321088**

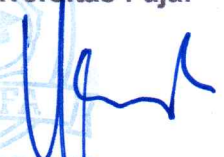
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **07 September 2019** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

| No. | Nama Penguji                       | Jabatan    | Tanda Tangan   |
|-----|------------------------------------|------------|--|
| 1.  | Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., AK., CA | Ketua      | 1.....  |
| 2.  | Nurbayani, S.E., M.Si.,            | Sekretaris | 2.....  |
| 3.  | Muhammad Gafur, S.E., M.Si         | Anggota    | 3.....  |
| 4.  | Dr. Nirwana, S.E., M.Si., AK., CA  | Eksternal  | 4.....  |

Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom  
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar

  
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIDN: 0925107801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Tiara Rombe Allo  
NIM : 1510321088  
Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 September 2019

Yang membuat pernyataan,



Tiara Rombe Allo

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir unuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.A) pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan-masukan kepada peneliti. Untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Sama' Garanta dan Serly Upa' berkat segala curahan kasih sayang, dukungan dan doanya. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., AK.,CA selaku dosen Pembimbing Skripsi, beliau telah banyak memberikan arahan dan tambahan ilmu bagi saya selama ini menjalani penelitian ini.

Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.
4. Bapak Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar.

6. Terimah kasih kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di tempat.
7. Saudara-saudara saya Serlianti Rombe Allo, Dorkas Rombe Allo, Idrus Inung Rombe Allo, Andri Rombe Allo, Randa Rombe Allo, dan Andini Rombe Allo, yang selalu memberikan dukungan semangat, motivasi, dan doa kepada saya sehingga terselesainya skripsi ini.
8. Sahabat saya, Febriliana Sapri Sende, Stenly Febrio, dan Febri Irawanti atas dukungan dan bantuan dalam pembuatan skripsi ini.
9. Farman Balla' Poddala yang selalu memberi dukungan dan selalu mengingatkan untuk tidak bermalas-malasan dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-teman saya yang selalu bekerja sama dalam memberikan dukungan, semoga kita selalu diberikan kesehatan serta mendapatkan kebaikan dari-Nya Amin.
11. Terakhir saya sampaikan kepada teman-teman angkatan 2015 S1 Akuntansi yang telah berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini

Makassar, Agustus 2019

Peneliti

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT**

**TIARA ROMBE ALLO**

**AHMAD DAHLAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perilaku penggelapan pajak, untuk menganalisis pengaruh pelayanan aparat pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perilaku penggelapan pajak, untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perilaku penggelapan pajak. Artikel ini berargumen bahwa penelitian ini dilakukan pada wajib pajak di wilayah Makassar. Data pokok dan data primer di peroleh dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden dan hasil jawaban dari kuesioner di olah guna pengujian hipotesis yang dimunculkan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel 52 wajib pajak di Wilayah Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak di wilayah Makassar maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, persepsi wajib pajak tentang pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak, persepsi wajib pajak tentang pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak, persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

**Kata Kunci: Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan**



## ABSTRACT

### ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE TAX AVASION BEHAVIOR OF WEST MAKASSAR PRATAMA TAX SERVICE

TIARA ROMBE ALLO

AHMAD DAHLAN

*The purpose of this study was to analyze the effect of understanding taxation on perceptions of individual taxpayers on tax evasion behavior, to analyze the effect of tax officer services on perceptions of private taxpayers on tax evasion behavior, to analyze the effect of tax sanctions on perceptions of private taxpayers on tax evasion behavior. this article argues that this research was conducted on taxpayers in the Makassar region. Principal data and primary data obtained by using a questionnaire given to the respondents and the results of the answers to the questionnaire if processed for testing the hypothesis that is raised. in this study researchers took a sample of 52 taxpayers in the Makassar region*

*Based on the results of research on perceptions of taxpayers against tax evasion in the Makassar region, it can be concluded that, perceptions of individual taxpayers about understanding taxation do not affect the behavior of tax evasion, perceptions of private taxpayers about the service of tax officials positively affect the behavior of tax evasion , the perception of individual taxpayers about tax sanctions does not affect tax evasion behavior.*

**Keywords: Understanding of taxation, Tax officer services, tax sanctions**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN Sampul.....                    | i    |
| HALAMAN Judul.....                     | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                | iii  |
| LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....        | iv   |
| PRAKATA.....                           | v    |
| ABSTRAK.....                           | vi   |
| DAFTAR ISI.....                        | viii |
| DAFTAR TABEL.....                      | xii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                    | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                  | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                 | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....               | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah.....               | 7    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....             | 7    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....            | 8    |
| 1.4.1 Kegunaan Teoritis .....          | 8    |
| 1.4.2 Kegunaan Praktis .....           | 8    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....           | 9    |
| 2.1 Landasan Teori .....               | 9    |
| 2.1.1 Teori Persepsi.....              | 9    |
| 2.1.2 Theory of Planned Behavior ..... | 12   |
| 2.1.3 Etika.....                       | 13   |
| 2.1.4 Pengertian Pajak.....            | 13   |
| 2.1.5 Pengertian Wajib Pajak.....      | 15   |
| 2.1.6 Penggelapan Pajak.....           | 15   |
| 2.1.7 Pemahaman Perpajakan.....        | 16   |
| 2.1.8 Pelayanan Aparat Pajak.....      | 17   |
| 2.1.9 Sanksi Perpajakan .....          | 19   |
| 2.2 Kerangka Pemikiran .....           | 20   |
| 2.3 Tinjauan Empiris .....             | 21   |
| 2.4 Hipotesis Penelitian.....          | 22   |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Atas Perilaku Penggelapan pajak .....             | 22        |
| 2.4.2 Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Perilaku Penggelapan...<br>Pajak ..... | 23        |
| 2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak....              | 23        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>   | <b>26</b> |
| 3.1 Rancangan Penelitian .....  | 26        |
| 3.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....  | 26        |
| 3.2 Populasi dan Sampel .....   | 26        |
| 3.4 Jenis dan Sumber Penelitian .....   | 27        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....   | 27        |
| 3.6 Pengukuran Variabel.....  | 27        |
| 3.7 Devenisi Variabel .....   | 28        |
| 3.7.1 Pemahaman Perpajakan .....  | 28        |
| 3.7.2 Pelayanan Aparat Pajak .....  | 28        |
| 3.7.3 Sanksi Perpajakan.....  | 29        |
| 3.7.4 Perilaku Penggelapan Pajak .....  | 30        |
| 3.8 Instrumen Penelitian .....  | 33        |
| 3.9 Analisis Data.....  | 34        |
| 3.10 Metode Analisis Data.....  | 34        |
| 3.10.1 Statistik Deskriptif.....  | 34        |
| 3.10.2 Uji Validitas .....  | 34        |
| 3.10.3 Uji Reliabilitas .....   | 35        |
| 3.10.4 Uji Normalitas.....  | 35        |
| 3.10.5 Uji Hipotesis .....  | 35        |
| 3.10.6 Uji Statistik T .....  | 36        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>37</b> |
| 4.1 Sejarah Singkat Organisasi .....  | 37        |
| 4.2 Visi dan Misi Organisasi .....  | 38        |
| 4.3 Struktur Organisasi.....  | 40        |
| 4.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi .....   | 43        |
| 4.5 Pembahasan .....  | 35        |
| 4.5.1 Sebaran Data Penelitian .....   | 45        |

|  |    |
|--|----|
| 4.6 Karakteristik Responden .....              | 46 |
| 4.6.1 Jenis Kelamin.....                       | 46 |
| 4.6.2 Pendidikan .....                         | 47 |
| 4.6.3 Pekerjaan.....                           | 47 |
| 4.7 Analisis Data .....                        | 48 |
| 4.7.1 Statistik Deskriptif .....               | 48 |
| 4.7.2 Uji Validitas .....                      | 50 |
| 4.7.3 Uji Normalitas.....                      | 50 |
| 4.7.4 Uji Asumsi Klasik .....                  | 52 |
| 4.7.4.1 Uji Heterokedastisitas .....           | 52 |
| 4.7.4.2. Uji Multikolinearitas.....            | 53 |
| 4.7.5 Uji Realibilitas .....                   | 54 |
| 4.7.6 Hasil Analisis Linear Berganda .....     | 45 |
| 4.7.7 Hasil Uji t.....                         | 56 |
| 4.7.8 Tabulasi Hasil Pengujian Hipotesis ..... | 57 |
| 4.9 Pembahasan .....                           | 58 |
| BAB V KESIMPULAN .....                         | 61 |
| 5.1 Kesimpulan .....                           | 61 |
| 5.2 Implikasi .....                            | 61 |
| 5.3 Keterbatasan Penelitian .....              | 62 |
| 5.4 Saran .....                                | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                            | 63 |
| LAMPIRAN .....                                 | 64 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| 1.1 Kerangka Populasi.....                    | 5  |
| 1.2 Daftar Penggelapan Pajak .....            | 7  |
| 2.3 Tinjauan Empiris .....                    | 19 |
| 4.1 Sebaran Data Penelitian .....             | 45 |
| 4.6.1 Distribusi Jenis Respdnen .....         | 45 |
| 4.6.2 Pendidikan .....                        | 47 |
| 4.6.3 Ditribusi Pekerjaan Responden .....     | 48 |
| 4.7.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....    | 49 |
| 4.7.2 Uji Validitas .....                     | 50 |
| 4.7.3 Uji Normalitas.....                     | 50 |
| 4.7.4.1 Hasil Uji Durbin Watson .....         | 51 |
| 4.7.4.2 Uji Heterokedastisitas .....          | 52 |
| 4.7.5 Hasil Uji Reliabilitas Penelitian ..... | 54 |
| 4.7.6 Hasil Analisis Regresi.....             | 55 |
| 4.7. 7Hasil Uji Persial .....                 | 56 |
| 4.7.8 Hasil Pengujian Hipotesis.....          | 57 |

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| 2.1 Hubungan Antara Perilaku dan Persepsi ..... | 9  |
| 2.3 Kerangka Pemikiran.....                     | 18 |
| 4.3 Struktur Organisasi .....                   | 35 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bagi sebagian besar Negara, tak terkecuali Indonesia sebagai Negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan Negara. Pemerintah Negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Dalam melaksanakan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar guna mewujudkannya. Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstentifikasi penerimaan jumlah pajak Trisnawati, Eka, (2011). Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan yang digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, Waluyo, (2016). Untuk itu, sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sistem pemungutan pajak adalah salah satu di antara elemen yang penting agar dapat menunjang keberhasilan penerimaan pajak suatu negara.

Dalam sejarah perkembangan pajak, pemungutan pajak di Indonesia dapat di bagi menjadi 2 periode, yaitu periode sebelum tahun 1984 dan periode tahun 1984 sampai sekarang. Pembagian tersebut berdasarkan pada perundang-undangan perpajakan yang mengacu pada lahirnya undang-undang setelah kemerdekaan Markus, (2004). Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *official assetsment system*, *selft assessment system*, dan *with holding system*. Oleh karena penerimaan pajak akan ditingkatkan, maka sejak reformasi tahun 1984 pemerintah Negara Indonesia menerapkan *self assetsment system*. Dalam sistem ini wajib pajak akan diberikan kemudahan dalam menetapkan pajaknya, yaitu dengan menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri., sedangkan fiskus pajak berperan sebagai pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan.

Menurut Rahayu, (2010) penggelapan pajak adalah usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, memanipulasi secara illegal terhadap hutang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah tertutang menurut aturan perundang-undangan. Dalam hal ini penggelapan pajak terjadi saat pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan mereka terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan setiap bulannya serta penggunaan uang tersebut, itu semua menurut mereka tidak ada transparansi dari penerimaan pajak tersebut.



Trisnawati, Eka, (2013) Salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih spesifik lagi adalah keadilan. Ini dikarenakan pajak adalah sesuatu yang bersifat memaksa, sehingga masyarakat wajib membayar pajak meskipun tidak mendapat imbalan dari pemerintah. Ini juga menjadi permasalahan dalam perpajakan, sebab masyarakat merasa tidak adil dalam pemungutan pajak Negara dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan pertentangan terhadap pajak.

Seperti yang diketahui, pajak merupakan tiang dari penerimaan Negara. Namun kasus yang terjadi di Indonesia mengenai penggelapan pajak yaitu, kasus yang muncul pada tahun 2012 adalah kasus yang menimpa PT Mutiara Virgo. Perusahaan tersebut melakukan penyuaipan kepada pegawai pajak agar mengurangi pajak yang akan di bayar dan melakukan pencucian uang. Akibat khusus tersebut, Johnny Basuki dijatuhi hukuman penjara denda ratusan juta rupiah. Sedangkan Herly Isdiharsono sebagai pegawai pajak KPP Pratama Jakarta Palmerah, menerima sanksi hukuman penjara dan harus membayar ratusan juta rupiah. (Liputan6.com, April 2013), Agoes, Sukrisno, (2014).

Adanya diskriminasi juga menyebabkan terjadinya penggelapan pajak, perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan bidang kemasyarakatan lainnya.

Pajak merupakan suatu beban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak baik itu pribadi maupun badan. Untuk itu, banyak wajib pajak yang berusaha untuk meminimalkan pajak. Penghindaran pajak dilakukan dengan meminimalkan beban

pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan. Sebaliknya, penggelapan pajak dilakukan dengan meminimalkan atau bahkan menghilangkan beban pajak yang terutang, dengan melanggar peraturan perundangan perpajakan. Selain itu, mayoritas literature yang meneliti penggelapan pajak dari perspektif etika menyimpulkan bahwa penggelapan pajak dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, dengan alasan berbeda-beda Agoes, (2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Arum, (2012) mengkaji pengaruh dari kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa variabel-variabel independen yaitu, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Rahman (2013) melakukan penelitian mengenai persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan menggunakan variabel penelitian antara lain, pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan kemungkinan kecuranangan. Dengan menggunakan uji regresi berganda diperoleh hasil bahwa keadilan dan diskriminasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kota Makassar khususnya pada kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat atas perilaku penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak, apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh

terhadap perilaku penggelapan pajak, dan apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

**Daftar Tabel 1.1**  
**Kerangka Populasi Di KPP Pratama Makassar Barat**

| <b>Tahun</b> | <b>WP Terdaftar</b> | <b>WP Aktif</b> | <b>WP Non Aktif</b> |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 2014         | 93,577              | 59,725          | 33,852              |
| 2015         | 99,447              | 65,471          | 33,976              |
| 2016         | 105,539             | 71,478          | 34,061              |
| 2017         | 111,294             | 77,216          | 34,075              |
| 2018         | 117,304             | 83,215          | 34,089              |

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.*

**Daftar Tabel 1.2**  
**Daftar Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama**  
**Makassar Barat**

| <b>TAHUN</b> | <b>PRESENTASE</b> |
|--------------|-------------------|
| 2014         | 13,2%             |
| 2015         | 11,18%            |
| 2016         | 7,18%             |
| 2017         | 6,2%              |
| 2018         | 3,36%             |

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Alasan dalam pemilihan di kota Makassar dikarenakan kota Makassar merupakan kota sangat berkembang pada saat ini dengan jumlah setoran pajak yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun dalam kurun waktu yang sama memprlihatkan belum mecapai penarikan pajak sebagaimana yang telah ditargetkan. Selain itu, alasan peneliti dalam mengangkat judul ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui penyebab dari perilaku penggelapan pajak seperti yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak?
2. Apakah pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak.

2. Untuk mengetahui pelayanan aparat pajak terhadap perilaku penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan Pribadi terhadap perilaku penggelapan pajak.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian terbagi menjadi 2 kegunaan yaitu seperti berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Diharapkan mampu membuktikan bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak.
2. Diharapkan mampu membuktikan bagaimana pelayanan aparat pajak terhadap perilaku penggelapan pajak.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran perpajakan dan kegunaan dari pajak itu sendiri.
2. Diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak oleh Wajib Pajak agar kedepannya praktik penggelapan pajak (*tax avasion*) dapat ditekan serendah mungkin.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian tinjauan pustaka berisi landasan teori yang digunakan dan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis. Dalam bagian ini juga dikemukakan kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang melandasi penelitian.

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori berisi penjelasan mengenai teori-teori dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **2.1.1 Teori Persepsi**

Untuk memahami persepsi terhadap perilaku penggelapan pajak terlebih dahulu akan diterangkan beberapa konsep mengenai persepsi menurut para ahli. Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. menurut Masyahrul (2013), yang dimaksud dengan persepsi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu, sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi terhadap ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan, dan sebagainya sehingga bayangan itu dapat disadarinya. Menurut Hery (2014) persepsi adalah hasil atau proses yang melahirkan kesadaran akan sesuatu hal dengan perantaraan pemikiran yang sehat. Mardiasmo (2016) mengemukakan bahwa persepsi mencakup dua proses kerja yang saling terkait, yaitu:

1. Menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan melalui indera lainnya.
2. Penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tersebut.

Arti ditetapkan melalui kesan-kesan dengan struktur pengertian (keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman masa lalu seseorang) dan struktur evaluatif (nilai-nilai yang dipegang seseorang). Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi mengandung unsur:

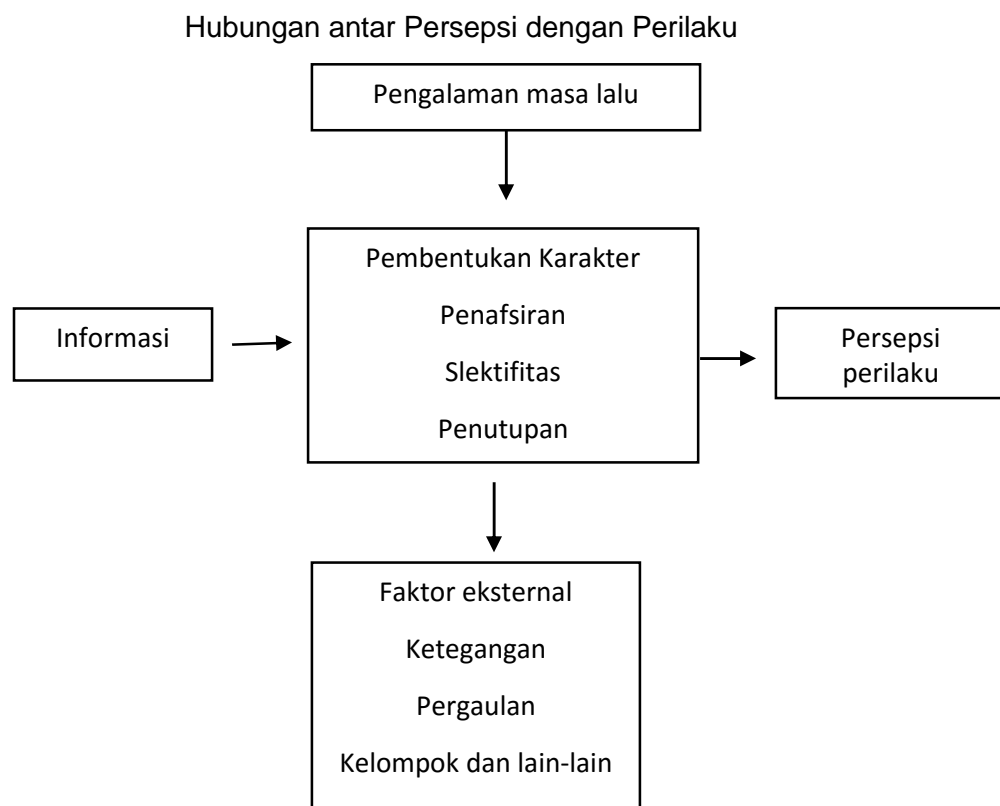
1. Adanya kesan inderawi
2. Penafsiran dan penetapan arti atas kesan-kesan inderawi
3. Timbulnya kesadaran atas suatu objek tertentu
4. Pengaruh pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan kemudian menafsirkan suatu objek tertentu, dimana penafsiran itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut.

Hal ini sejajar dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muljono dan Wicaksono (2010) tentang persepsi yang mengatakan bahwa persepsi merupakan proses menerima, menyeleksi, menguji, mengorganisasikan serta mengartikan suatu obyek kepada indera atau data. Persepsi tidak terlepas dari pengamatan individu terhadap lingkungan. Sebagaimana dikatakan oleh Lubis (2010), bahwa proses pemberian makna kepada lingkungan oleh individu disebut dengan persepsi.

Oleh karena itu, persepsi merupakan respons dari penerimaan kesan melalui penglihatan, sentuhan atau melalui indera lainnya, yang kemudian ditung penafsirkan berdasarkan pengalaman yang berbeda dari tiap individu. Hery (2014),

respon individu terhadap obyek akan bergantung pada persepsi yang timbul pada dirinya. Kesamaan perilaku akan terjadi apabila individu-individu mempunyai persamaan persepsi terhadap obyek. Agar lebih jelasnya hubungan persepsi dengan sikap dan perilaku akan diuraikan dalam diagram sebagaimana dilukiskan oleh Waluyo (2016) dibawah ini:

Gambar 2.1



Sumber: Waluyo (2016).

gambar 2.1 di atas tampak bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh persepsinya secara langsung. Perilaku individu terhadap etika perpajakan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap obyek yang bersangkutan. Persepsi individu



terhadap suatu objek akan membentuk perilakunya, Waluyo (2016). Dalam konteks yang lebih besar perilaku individu akan membentuk perilaku masyarakat wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban membayar pajak, karena konstruksi masyarakat merupakan sekumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan bersama.

### **2.1.2 Teori Atribusi**

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Suartana 2013)

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijeaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah

dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu , misalnya dalam bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka merasakan atribut internalnya dari pada atribut eksternalnya (Suartana, 2013).

### **2.1.3 Theory of Planned Behavior (TPB)**

Hery (2014) Mengungkapkan bahwa *Theory of Planner Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain subjektif, individu juga mempertimbangkan control tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. *Theory of Planned Behavior* (TPB) membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu :

1. *Behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari sesuatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
2. *Normatif Belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang berikan. Hal ini akan membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*).
3. *Control Belief*, yaitu keyakinan masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini

membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Faktor utama dalam teori ini adalah niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk berperilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan.

#### **2.1.4 Etika**

Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini Erika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok. Masyarul Tony (2013), mengungkapkan etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari suatu individu ke individu yang lain atau satu generasi ke generasi lain. etika berperan menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan seseorang individu. Dalam memandang perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*), bahwa pengalaman-pengalaman wajib pajak dapat menimbulkan kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Dengan demikian tindakan penggelapan pajak akan dipersepsikan sebagai tindakan yang tidak etis dan wajib pajak cenderung menghindari perilaku tersebut.

#### **2.1.5 Pengertian Pajak**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hery (2014).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara (Suminarsasi, 2011).

Dari beberapa pendapat di atas maka pajak dapat disimpulkan sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Dengan pentingnya pajak bagi Negara maka diharapkan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya agar perencanaan pembangunan terus berlanjut, untuk itu peran serta wajib pajak sangat menentukan tercapainya penerimaan pajak. Adapun sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **2.1.6 Pengertian Wajib Pajak**

Pengertian Wajib Pajak UU No. 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”, Rahayu (2010). Menurut Abdul Rahman (2010) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Fidel (2010) berpendapat bahwa wajib pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subjek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat objektif yang ditemukan oleh Undang-undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.7 Penggelapan Pajak**

Mardiasmo (2016) mengatakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah keinginan wajib pajak yang berusaha mengurangi utang pajaknya dengan cara melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, pengguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung Negara sampai kepada kerjasama dengan aparat perpajakan, suap menyuap dan pemalsuan-pemalsuan. Muljono (2010) kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak berperilaku curang.
2. Semakin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan.
3. Makin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka makin rendah kecenderungan wajib pajak berlaku curang.
4. Makin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

#### **2.1.8 Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman akan peraturan perpajakan erat kaitanya dengan pembayaran pajak. Masyahrul (2013) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah:

1. Wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Syarat-syarat tersebut bisa dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dikarenakan: pertama, wajib pajak apabila ada wajib pajak baru yang akan membayar pajak, harus mendaftarkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan NPWP, selanjutnya wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP harus memperbaharui kepemilikan tersebut agar dapat membayar pajak secara berkelanjutan.

Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan melaporkan SPT oleh wajib pajak Waluyo (2016). Secara psikologis dan sadar hukum, Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak umumnya bertujuan untuk menghindari jumlah pajak terutang yang harus disetorkan ke kas Negara. Hery (2014) menyatakan bahwa sosialisasi akan Undang-Undang Perpajakan dan sanksi yang dikenakan apabila melanggar ketentuan perpajakan, diharapkan dapat menjadi solusi atas kasus-kasus penggelapan pajak. Ditambah dengan sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dipahami, akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai, sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman perpajakan dan kesadaran dalam membayar pajak, sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

#### **2.1.9 Pelayanan Aparat Pajak**

Menurut Lubis (2010) berpendapat bahwa untuk menciptakan kualitas pelayanan yang baik, pelayanan harus diproses secara terus menerus dan prosesnya mengikuti jarum jam, yaitu dimulai dari apa yang dilakukan, menjelaskan

bagaimana cara mengerjakannya memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan, diakhiri dengan menyediakan pembimbing dan mengoreksi, sementara mereka mengerjakannya. Tujuan dari pelayanan pajak dan sekaligus pemeriksaan pajak sendiri berdasarkan UU Nomor 29 ayat (1), antara lain:

1. Pemberian Nomer Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
2. Penghapusan Nomer Pokok Wajib Pajak;
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Netto;
6. Pencocokan data atau alat keterangan;
7. Penentuan Wajib Pajak di daerah lokasi terpencil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 dalam Markus (2007) tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pelayanan dan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelayanan Prima menurut Hery (2014) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini tugas pemeriksaan dan memberikan pelayanan pajak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat jenderal Pajak Departemen Keuangan yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindakan pidana perpajakan.



### 2.1.10 Sanksi Perpajakan

Rahman (2013), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma pepajakan) akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian Negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan sanksi berupa kurungan.

Markus (2004) menyebutkan bahwa sanksi merupakan suatu alat terakhir atau bentang hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Beberapa indikator sanksi perpajakan sebagai berikut:

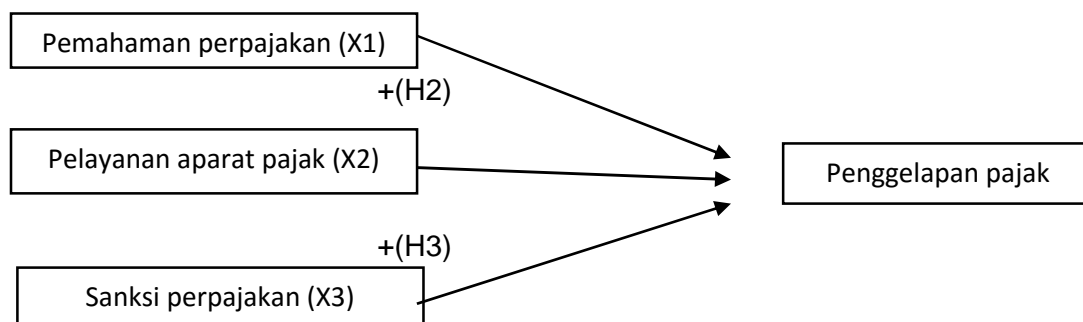
1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan memberatkan.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggar aturan perpajakan tanpa terkecuali.

Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhan dalam melakukan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melakukan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih baik lagi ke masyarakat, sebagai wajib pajak, akan kegunaan dari uang pajak yang disetorkan kepada Negara dan sanksi apabila melanggar kewajiban perpajakan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini yang dimaksud persepsi sendiri adalah sudut pandang utidak etis atau tidak etis untuk dilakukan. Variabel perilaku penggelapan pajak yang dipersepsikan dalam penelitian ini diduga dipengaruhi oleh variabel pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan, tingkat pelayanan aparat pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan, dan pengetahuan Wajib Pajak terkait sanksi perpajakan. Adapun kerangka pemikiran yang dimaksud sebagaimana gambar 2.3 berikut ini

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: data diolah 2019

### 2.3 Tinjauan Empiris

**Tabel 2.3**  
**Tinjauan Empiris**

| <b>Nama Peneliti<br/>(Tahun)</b> | <b>Variabel</b>  | <b>Alat Uji</b>  | <b>Hasil Penelitian</b>  |
|----------------------------------|--|--|--|
| Prasetyo<br>(2010)               | Variabel independen:<br>Pemahaman wajib pajak<br>Variabel moderisasi:<br>Penggelapan pajak<br>Variabel dependen:<br>Persepsi wajib pajak.  | Uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis deskriptif  | Hasil penelitian menunjukkan semakin baik pemahaman akan aturan pajak, 85,74% WP tidak setuju dengan praktik penggelapan pajak. 95,56% PNS tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak  |
| Arum (2012)                      | Variabel independen:<br>Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak,<br>Variabel dependen:<br>kepatuhan wajib pajak   | Uji kualitas data, uji regresi berganda, uji asumsi klasik | Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  |
| Rahman<br>(2013)                 | Variabel Independen:<br>pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi kemungkinan kecurangan.<br>Variabel dependen:<br>persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> ) | Uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda | Diperoleh hasil bahwa keadilan dan diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Variabel diskriminasi memiliki nilai standar <i>coefficient beta</i> paling dominan dalam mempengaruhi etika penggelapan pajak sebesar 0,587. |

Penelitian-penelitian yang menjadi acuan dalam penyusunan usulan penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2010). Penelitian tersebut memaparkan hasil studi kasus mengenai penelitian pengaruh dari persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa 85,74% pegawai swasta tidak setuju dengan adanya

praktik penggelapan pajak; 82,13% wiraswasta tidak setuju dengan adanya berbagai praktik penggelapan pajak; dan 95,56% Pegawai Negeri Sipil tidak setuju dengan adanya praktik penggelapan pajak.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

### **2.4.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan WPOP Terhadap Wajib Pajak Atas Perilaku Penggelapan pajak**

Pengaruh pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan dapat dipahami oleh Wajib Pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar harapannya ke depan, Pratik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan Wajib Pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak etis untuk dilakukan. Muljono (2010) mwajib mengatakan bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak etis untuk dilakukan. Muljono (2010) mengatakan bahwa pemahaman perpajakan wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas akanb cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

Prasetyo, (2010) Mengacu pada teori persepsi, timbulnya persepsi oleh individu di pengaruhi oleh stimulus-stimulus, salah satunya pemahaman terhadap objek, dalam hal ini pemahaman perpajakan. Wajib pajak akan menganggap buruk dan cenderung menghindari suatu tindakan yang melanggar ketentuan apabila pemahaman yang dimilikinya semakin baik. Dari pernyataan diatas, dapat

dikembangkan sebuah hipotesis mengenai pengaruh dari pemahaman perpajakan oleh Wajib Pajak Orang pribadi terhadap persepsi atas perilaku penggelapan pajak. Hipotesis pertama yang diusulkan adalah:

H1 : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Hipotesis diatas menunjukkan bahwa semakin banyak pengetahuan perpajakan yang di miliki maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis, sebaliknya semakin berkurang pengetahuan yang dimiliki maka perilaku penggelapan pajak di anggap cenderung tidak etis.

#### **2.4.2 Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Persepsi WPOP Atas Perilaku Penggelapan Pajak.**

Peningkatan pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan ilegal, tidak etis dan melanggar hukum. Di sisi lain, dengan semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak secara langsung memudahkan tugas Direktur Jenderal Pajak sebagai instansi pengelola dana pajak. pelayanan prima menurut Mujono (2010) adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terus menerus. Rahman, (2013) Kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. Dari pemikiran diatas , hipotesis kedua yang diusulkan adalah:

H2 : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Hipotesis diatas menunjukkan bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, begitupun sebaliknya semakin buruk pelayanan yang diberikan, maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang etis.

#### **2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi WPOP Atas Perilaku Penggelapan Pajak.**

Semakin besarnya denda yang dibebankan akan mendorong Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan teori persepsi yang dikemukakan pada pembahasan latar belakang diperoleh hubungan bahwa pemberian sanksi perpajakan yang berat akan menimbulkan persepsi dalam dari pembayaran pajak bahwa pajak merupakan ancaman, karena mengurangi jumlah pendapatan yang diperoleh Muljono, (2010). Dalam hal ini dapat diindikasikan bahwa tindakan membayar pajak akan merugikan diri pribadi dan Wajib Pajak cenderung melakukan upaya tidak melaporkan jumlah pajak disetor yang semestinya Prasetyo, (2010). Berdasarkan pemikiran diatas, maka dikemukakan hipotesis ketiga diuji sebagai berikut:

H3 : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak.

Hipotesis di atas menunjukkan bahwa semakin wajar sanksi yang diberikan, maka perilaku penggelapan pajak akan dipandang etis, begitupun sebaliknya

semakin berat sanksi yang di berikan makan perilaku penggelapan pajak cenderung di anggap etis.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perilaku penggelapan pajak, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan. Defenisi dari masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat, Jl. Balai Kota No. 15 Makassar. Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti dan mengelolah data dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019.

#### **3.3 Populasi dan sampel**

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini yaitu terdapat 117,304 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdapat pada KPP Pratama Makassar Barat. Dan yang menjadi pupulasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang datang pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Barat.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara *nonprobability sampling* yaitu sampling insedental. Sampling insedental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan sebuah kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat dijadikan sampel, bila orang tersebut cocok



untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2016). Ada pun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Makassar Barat.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana berupa angka yang tertera didalam skala kuisisioner yang kemudian diolah menggunakan Software SPSS Ghazali (2011). Data diperoleh dari kuisisioner dalam bentuk pertanyaan yang dibagikan oleh responden, sumber data penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang berdomisili di Kota Makassar dan melakukan kegiatan usaha yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survey. Metode survey dilakukan dengan pendistribusian kuisisioner yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara kepada responden, yaitu WP OP yang melakukan usaha di Kota Makassar. Kuisisioner yang diberikan berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, dan persepsi wajib pajak atas perilaku penggelapan pajak.

### **3.6 Pengukuran Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat empat (4) variabel, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat pada penelitian ini adalah perilaku penggelapan pajak dalam membayar pajaknya

2. Variaber Bebas ( *Independent Variable*)

Variabel bebas pada penelitian ini adalah pemahaman perpajakan (X1) pelayanan aparat pajak (X2), dan sanksi perpajakan (X3)

### **3.7 Defenisi Operasional Variabel**

#### **3.7.1 Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman ini berkaitan dengan seberapa besar Wajib Pajak Orang Pribadi mengetahui Ketentuan Perpajakan secara menyeluruh, meliputi segala aspek mulai dari pelaporan dan pembayaran pajak terutang. Indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pada penelitian Hery (2014) yang dikembangkan antara lain:

1. Tingkat pengetahuan tentang kewajiban sebagai Wajib Pajak;
2. Tingkat pengetahuan tentang hak sebagai Wajib Pajak;
3. Tingkat pengetahuan tentang sanksi perpajakan;
4. Tingkat pengetahuan mengenai tarif Pajak;
5. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.

Dalam melakukan pengukuran variabel menggunakan skala likert skala 1 sampai 5 dengan perincian sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju

Angka 2 = Tidak Setuju

Angka 3 = Kurang Setuju

Angka 4 = Setuju

Angka 5 = Sangat Setuju

#### **3.7.2 Pelayanan Aparat Pajak**

Kualitas pelayanan berpusat pada suatu upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan dengan kata lain ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas

pelayanan. Yaitu pelayanan yang diharapkan (*expected service*) dan pelayanan yang diterima atau dirasakan (*perceived service*), Suminarsasi (2013)

Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Dirjen Pajak maka dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.

Ada beberapa indikator yang dikembangkan berdasarkan penelitian Suminarsasi (2013), yang menunjukkan bahwa pelayanan pajak yang berkualitas akan memengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Indikator-indikator antara lain:

1. Tingkat keahlian perpajakan dari pelayanan aparat pajak;
2. Tingkat pengetahuan perpajakan dari aparat pajak;
3. Tingkat pengalaman perpajakan dari aparat pajak;
4. Tingkat kesediaan membantu wajib pajak;
5. Kemampuan administrasi pajak dari aparat pajak;
6. Tingkat pemahaman perundang-undangan perpajakan dari aparat pajak

Semakin baik pelayanan aparat pajak maka akan menumbuhkan sikap positif Wajib Pajak dalam melaksanakan proses perpajakan dan menimalisir kecurangan pajak. Pengukuran dari setiap indikator diatas menggunakan skala Likert dari skala 1 sampai 5. Adapun perincian dari skaa Likert yang digunakan sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat TidakSetuju

Angka 2 = Tidak Setuju

Angka 3 = Kurang Seuju

Angka 4 = Setuju

Angka 5 = Sangat Setuju

### **3.7.3 Sanksi Perajakan**

Sanksi ajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti dengan kata lain, idealnya sanksi perpajakan merupakan alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi maka wajib paja akan semakin merasakan kerugian, sehingga harapanya wajib pajak tidak melakukn tindakan illegal yang melanggar aturan perpajakan Markus (2004) pengukran variabel sanksi pajak menggunakan pengukuran skala Likert 5 point denga perincian sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju

Angka 2 = Tidak Setuju

Angka 3 = Kurang Setuju

Angka 4 = Setuju

Angka 5 = Sangat Setuju indikator sanksi pajak mengacu pada penelitian Arum (2012) serta penelitian Markus (2004) yang dikembangkan antara lain:

1. Tingkat sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan.
2. Tingkat sanksi dministrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak.
3. Banyaknya sanksi sebagai salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.
4. Tingkat pemberian sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali.

### **3.7.4 Perilaku Penggelapan Pajak.**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah persepsi atas perilaku penggelapan akan dipersepsikan oleh Wajib Pajak sebagai perilaku tidak etis untuk dilakukan. Varibel dependen ini diukur dengan mengajukan pertanyaan yang berkisar mengenai perepsi wajib pajak atas praktik penggelapan pajak. Pengukuran Variabel

ini menggunakan instrument yang dikembangkan dari Suminarsasi (2011) dan Rahman (2013). Pertanyaan menunjukkan skala likert terkait persepsi wajib pajak terhadap perilaku penggelapan pajak yang diukur dengan menggunakan skala Likert 5 point dengan perincian sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju

Angka 2 = Tidak Setuju

Angka 3 = Kurang Setuju

Angka 4 = Setuju

Angka 5 = Sangat Setuju

Indikator penggelapan pajak menurut Suminarsasi (2011) dan Rahman (2013) yang dikembangkan dalam penelitian, antara lain:

1. Penerapan tariff pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak,
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar,
3. Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap WP dalam melakukan praktik penggelapan pajak.
4. Integritas atau mentalitas aparat pajak/fiskus dan pejabat pemerintah yang baik serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak,
5. Konsekuensi melakukan penggelapan pajak dan berusaha menyuap fiskus.

Jika responden memiliki kecenderungan memilih pilihan sangat setuju, maka perilaku penggelapan pajak dipersepsikan sebagai tindakan yang merugikan dan tidak etis dilakukan dalam pelaksanaan perpajakan.

Tabel 3.7

## Defenisi Operasional Variabel

| Variabel                       | Defenisi  | Indikator   |
|--------------------------------|---|---|
| Perilaku Penggelapan Pajak (Y) | Penggelapan pajak adalah keinginan wajib pajak yang berusaha mengurangi utang pajaknya dengan cara melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. (Suminarsasi, 2013) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan tariff pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan Wajib Pajak,</li> <li>2. Menyampaikan SPT deng tidak benar,</li> <li>3. Penggelapan pajak dianggap beretika karena pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap WP dalam melakukan praktik penggelapan pajak.</li> <li>4. Integritas atau mentalitas aparat pajak/fiskus dan pejabat pemerintah yang baik serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak,</li> <li>5. Konsekuensi melakukan penggelapan pajak dan berusaha menyuap fiskus.</li> </ol> |
| Pemahaman Perpajakan (X1)      | Pemahaman prpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan mengenai pemahaman perpajakan</li> <li>2. Pengetahuan mengenai tata</li> </ol>  |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
|                           |   | <p>cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan</p> <p>3. Pengetahuan tentang fungsi dan peranan</p>  |
| Pelayanan Aparat Pajak X2 | Suatu kegiatan yang diberikan kantor pelayanan pajak (KPP) berupa layanan prima perpajakan untuk memberikan kepuasan atas melayani kebutuhan wajib pajak  | <p>1. Keandalan (<i>reliability</i>)</p> <p>2. Responsif (<i>responsiveness</i>)</p> <p>3. Empati (<i>empathy</i>)</p> <p>4. Berwujud/bukti fisik (<i>tangible</i>)</p> |
| Sanksi Perpajakan X3      | Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo,2016) | <p>1. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi pajak</p> <p>2. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi pajak</p>   |

### 3.8 Intrument Penelitian

Instrument dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala likert. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 5 alternatif jawaban “ Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Netral, Setuju, dan Sangat Setuju”. Skor yang diberikan adalah sebagai berikut:

| Sangat Tidak Setuju (STS) | Tidak Setuju (ST) | NETRAL (N) | Setuju (S) | Sangat Setuju (SS) |
|---------------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|
| 1                         | 2                 | 3          | 4          | 5                  |

### **3.9 Analisis Data**

Analisis data penelitian ini dengan menggunakan regresi linier berganda. Regresi linear berganda digunakan oleh peneliti bila penelitian bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen bila 3 variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi untuk diuji seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel X dan variabel Y, (Sugiono, 2016)

#### **3.10 Metode Analisis Data**

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **3.10.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif bertujuan untuk menganalisis konsisten dan akurasi sampel data penelitian. Kualitas data yang dihasilkan dari instrument penelitian dievaluasi dengan uji validitas dan uji reabilitas Hair dalam Ghozali (2011).

##### **3.10.2 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuisisioner penelitian, uji dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel, mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika nilai r lebih kecil dari r tabel berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan Ghozali (2011).

##### **3.10.3 Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisisioner penelitian yang merupakan indikator dari kostruk atau variabel. Menurut Ghozali (2011) kuisisioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil atau dari waktu ke waktu. Pengujian dilakukan dengan menghitung besarnya nilai *Cronbach's alpha* masing-masing instrumen dari suatu variabel. Suatu variabel dikatakan reliable jika besarnya nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0.7 Ghozali, (2011).



### 3.10.4 Uji Normalitas

Uji normalitas menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak Ghozali (2011). Indikator model regresi yang baik adalah memiliki data terdistribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi atau tidak yaitu dengan melihat analisis grafik atau uji statistik, jika menggunakan grafik, normalitas dapat dideteksi dengan melihat tabel histogram. Untuk jumlah sampel yang kecil dapat dibantu dengan melihat normal *probabilitas plot*, membandingkan distribusi kumulatif data asli dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Untuk menguji normalitas residual pada uji statistik non-parametrik Kolmogro-Smirnov (K-S), dengan membuat hipotesis:

1. HO: Data residual terdistribusi normal
2. HA: Data residual tidak terdistribusi normal.

### 3.10.5 Uji Hipotesis

Dalam menganalisis hipotesis penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah uji Regresi Berganda. Uji regresi ini digunakan untuk menganalisis data lebih dari satu variabel independen Ghozali (2011). Persamaan regresi yang dirumuskan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Persepsi Wajib Pajak atas perilaku penggelapan pajak

A = Konstanta

X1 = Pemahaman perpajakan

X2 = Pelayanan aparat pajak

X3 = Sanksi perpajakan

$e = \text{Error}$

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hitungan antara variabel dependen dengan variabel bebas. Perhitungan hipotesis statistik disebut signifikan secara statistik apabila  $H_0$  ditolak, sebaliknya disebut tidak signifikan apabila uji statistiknya menunjukkan  $H_0$  (hipotesis awal) diterima Ghozali (2011). Untuk mengukur fungsi regresi sampel apakah telah tepat secara statistik, dapat diukur dari besarnya nilai koefisien determinan, nilai statistik F dan nilai statistik t.

#### **3.10.6 Uji Statistik T**

Uji t dikenal dengan uji persial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel yang terkait Ghozali (2011).



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sejarah Organisasi**

KPP Pratama Makassar Barat adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah unit Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang secara hierarki berada di bawah Kantor Wilaya DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Lahirnya kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan langka Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pelayanan satu atap sebagai tuntunan reformasi birokrasi dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan penggabungan tiga kantor pelayanan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan, Kantor Pemeriksaan Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak.

Genderang modernisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melahirkan Kantor Pelayanan Pajak Pratma Makassar Barat sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008, sebagai pengalihan dari Kantor Pajak Bumi dan Bnagunan Ujung Pandang. KPP Pratama Makassar Barat termasuk sebagai salah satu kantor yang mengalami modenisasi administrasi perpajakan yang mencirikan administrasi berbasis fungsi yang melaksanakan administrasi perpajakan Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Wilaya kerja KPP Pratama Makassar Barat mencakup empat kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Ujung Pandang, Mariso, Mamajang dan Tamalate.

KPP Pratama Makassar Barat yang berkedudukan di Jl. Balai Kota Nomor 15 Makassar, mulai efektif beroperasi terhitung sejak tanggal 27 Mei 2008, sesuai

dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008. Selanjutnya peresmian Kantor ini dilakukan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008.

Sejak awal terbentuknya KPP Pratama Makassar Barat sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan, kantor ini telah mengalami tiga kali pergantian kepemimpinan. Dimulai pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 di pimpin oleh Bapak Dr. Drs Tubagus Djoli Rawayan Antawidjaja, S.E, AK., M.M.M.Hum. periode selanjutnya dipimpin oleh Bapak Agung Budiwibowo, S.T., M.T, sampai dengan bulan januari 2012, dan periode selanjutnya dippimpin oleh Bapak Drs. Ashri, M.M. Hingga saat ini dipimpin oleh Muhammad Sukri Subki, S.H., M.H.

#### **4.2 VISI Dan MISI KPP Pratama Makassar Barat**

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat sebagai berikut:

##### **1. VISI**

‘Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik di Indonesia serta Ikut Serta Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

##### **2. MISI**

Ikut Serta Menjamin Penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil di Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Barat.
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegrasi, kompeten dan professional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.



Berikut adalah uraian tugas masing-masing jabatan:

#### 1. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2. Sub. Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

#### 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak.

#### 4. Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

#### 5. Seksi Pemeriksaan

a. Melakukan evaluasi terhadap kebenaran dan kelengkapan format SPT.



- b. Melakukan analisa angka-angka yang tersaji pada SPT dan laporan keuangan
- c. Melacak angka-angka yang tersaji pada SPT dan laporan keuangan ke bukti pendukung.
- d. Melakukan pengujian kaitan yang dalam hal ini meliputi pengujian atas dokumen dasar dan pengujian atas jumlah-jumlah fisik.
- e. Pengujian atas mutasi setelah tanggal ketiga.
- f. Pemanfaatan informasi pihak ketiga.
- g. Melakukan pengujian fisik.
- h. Melakukan inspeksi.
- i. Rekonsiliasi/Equilisasi.
- j. Melakukan konfirmasi.

#### 6. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

#### 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/ himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan , penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan

ketetapan pajak, usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah atau bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.

#### 8. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

#### 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Adapun jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4.4 Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Makassar Barat**

Adapun Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sebagai berikut:

##### 1. Tugas Pokok KPP Pratama Makassar Barat

Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBN) dan pajak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain

itu KPP Pratama Makassar Barat mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional di bidang Pajak Negara di dalam daerah dan berwenang berdasarkan kebijaksanaan teknik yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. kebijaksanaan teknis yang di maksudkan adalah kegiatan operasional dalam penetapan perpajakan misalnya pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pemungutan pajak dan restitusi. Sedangkan yang di maksud dengan Pajak Negara adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

## 2. Fungsi KPP Pratama Makassar Barat

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan produk perpajakan.
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya.
- c. Pengawasan, pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- e. Pelaksanaan pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.
- f. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- g. Pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi perpajakan.

- h. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.
- i. Pelaksanaan administrasi perkantoran

#### 4.5 PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak di wilayah Makassar. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama Makassar Barat. Adapun untuk lebih jelas hasil penelitiannya akan di jaarkan tentang hasil lembaran data, karakteristik responden, hasil analisis, dan pembahasan.

##### 4.5.1 Sebaran Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Data pokok dan data primer di peroleh dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada respon dan hasil jawaban dari kuesioner di olah guna pengujian hipotesis yang di muncukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil 55 wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat. Adapun hasil penyebaran 55 eksemplar kuesioner di peroleh sebagai beikut:

**TABEL 4.1**  
**SEBARAN DATA PENELITIAN**

| NO | KUESIONER                     | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|-------------------------------|--------|------------|
| 1  | Kuesioner yang di sebar       | 55     | 100%       |
| 2  | Kuesioner yang kembali        | 52     | 94,55%     |
| 3  | Kusioner yang rusak           | 3      | 5,45%      |
|    | Jumlah kuesioner yang di olah | 52     | 94,55%     |

Sumber: Data primer di olah 2019

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang berjumlah 55 lembar di ketahui bahwa 94,55% atau 52 lembar kuesioner kembali. Namun, diantaranya jumlah kuesioner kembali terdapat 5,45% atau 3 lembar kuesioner yang rusak atau jawaban yang di butuhkan peneliti tidak lengkap sehingga tersisa 94,55% atau 52 lembar kuesioner yang bisa di olah.

#### **4.6 Karakteristik Responden**

Analisis statistik deskriptif karakteristik responden dalam penelitian ini di gunakan untuk mengetahui distribusi responden jika di lihat berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan pekerja. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

##### **4.6.1. Jenis Kelamin**

Berdasarkan distribusi data dari 52 wajib pajak pada KPP Prtama Makassar Barat. menurut jenis kelamin dapat di deskripsikan sebagai berikut:

**TABEL 4.6.1  
DISTRIBUSI JENIS RESPONDEN**

| <b>NO</b> | <b>Jenis Kelamin</b> | <b>Jumlah</b> | <b>Persentase</b> |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1         | Laki-laki            | 28            | 53,85%            |
| 2         | Perempuan            | 26            | 46,15%            |
|           | Jumlah               | 52            | 100%              |

Sumber: Data primer di olah 2019

Hasil data tentang jenis kelamin dari 52 wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Barat di ketahui bahwa 53,85% atau 28 orang responden mempunyai jenis kelamin laki-laki dan 46,15% atau 26 orang responden mempunyai jenis kelamin perempuan.

#### 4.6.2 Pendidikan

Berdasarkan dari distribusi data 52 wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat menurut tingkat pendidikan dapat di deskripsikan sebagai berikut:

**TABEL 4.6.2**  
**DISTRIBUSI TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN**

| No | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----|------------|--------|------------|
| 1  | SMA        | 14     | 26,92%     |
| 2  | Diploma    | 12     | 23,08%     |
| 3  | Strata 1   | 24     | 46,15%     |
| 4  | Strata 2   | 2      | 3,85%      |
|    | Jumlah     | 52     | 100%       |

Sumber: Data primer di olah 2019

Hasil distribusi tentang tingkat pendidikan dari 52 wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat di ketahui bahwa 26,92% atau 14 orang mempunyai pendidikan terakhir SMA, 23,08% atau 12 orang mempunyai pendidikan terakhir Diploma, 46,15% atau 24 orang mempunyai pendidikan terakhir Strata 1, 3,85% atau 2 orang mempunyai pendidikan terakhir Strata 2.

#### 4.6.3 Pekerjaan

Berdasarkan dari distribusi data 52 wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat menurut tingkat pendidikan dapat di deskripsikan sebagai berikut:

**TABEL 4.6.3**  
**DISTRIBUSI PEKERJAAN RESPONDEN**

| No | Pekerjaan      | Jumlah | Persentase |
|----|----------------|--------|------------|
| 1  | PNS            | 8      | 15,38%     |
| 2  | Pegawai Swasta | 18     | 34,62%     |
| 3  | Wiraswasta     | 22     | 42,31%     |
| 4  | Wirausaha      | 4      | 7,69%      |
|    | Jumlah         | 52     | 100%       |

Sumber: Data primer di olah 2019

Hasil distribusi tentang tingkat pendidikan dari 52 wajib pajak di KPP Pratama Makassar Barat di ketahui bahwa 15,38% atau 8 orang mempunyai pekerjaan sebagai PNS, 34,62% atau 18 orang mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai swasta, 42,31% atau 22 orang mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta, 7,69% atau 4 orang mempunyai pekerjaan sebagai wirausaha.

#### **4.7 Analisis Data**

Untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Makassar Barat dapat di lakukan dengan beberapa analisis yaitu:

##### **4.7.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif dalam penelitian ini di sajikan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain minimum, maximum, mean, dan standar deviasi. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif sebanyak 52 kuesioner yang dibagikan, maka hasil statistik deskriptif setiap variabel dapat dilihat pada tabel 4.7.1 berikut:

**TABEL 4.7.1**  
**HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF**

| <b>Descriptive Statistics</b> |    |         |         |       |                |
|-------------------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
|                               | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
| TOTAL_X1                      | 52 | 6       | 19      | 13,31 | 2,712          |
| TOTAL_X2                      | 52 | 7       | 18      | 14,35 | 2,619          |
| TOTAL_X3                      | 52 | 10      | 20      | 17,48 | 2,174          |
| TOTAL_Y1                      | 52 | 12      | 19      | 15,88 | 1,617          |
| Valid N<br>(listwise)         | 52 |         |         |       |                |

Sumber: Data primer di olah 2019

Tujuan dari hasil uji ini untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk di jadikan sampai penelitian. Kualitas data penelitian juga di tujukkan dengan nilai yang terdapat pada mean dan standar deviasi. Apabila mean lebih besar dari penyimpangannya maka kualitas data dikatakan lebih baik.

Berdasarkan tabel menunjukan hasil deskriptif data perusahaan yang dijadikan sampel penelitian dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis terhadap Pemahaman wajib pajak ( TOTAL\_X1) menunjukkan rata-rata sebesar 13,31. Nilai terendah sebesar 6 dan tertinggi sebesar 19 dengan standar deviasi sebesar 2,712. Nilai rata-rata sistem pelayanan perpajakan ( TOTAL\_X2) adalah 14,35 dengan standar deviasi 2,619. Nilai minimum sebesar 7 dan nilai maximum sebesar 18. Untuk nilai rata-rata sanksi perpajakan (TOTAL\_X3) adalah 17,48 dengan standar deviasi 2,174 di mana nilai minimum sebesar 10 dan nilai maximum sebesar 20. Sedangkan nilai rata-rata untuk persepsi pajak mengenai penggelapan pajak sebesar 15,88 dengan standar eviasi sebesar 1,617 pada nilai minimum sebesar 12 dan nilai maximum sebesar 19.



#### 4.7.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya kuisisioner penelitian, uji dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel, mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika nilai r lebih kecil dari r tabel berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan Ghozali (2011).

**TABEL 4.7.2**

#### Hasil Uji Validitas Data

| NO | VARIABEL | R HITUNG | R TABEL | KETERANGAN |
|----|----------|----------|---------|------------|
| 1  | X1       | 0,418    | 0,023   | Valid      |
| 2  | X2       | 0,397    | 0,023   | Valid      |
| 3  | X3       | 0,416    | 0,023   | Valid      |

Sumber: data diolah, 2019

Tabel diatas menunjukkan variabel pemahaman perpajakan, variabel pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan mempunyai kriteria untuk semua item dengan nilai r lebih besar dari r tabel maka item pertanyaan atau indicator tersebut dikatakan valid

#### 4.7.3 Uji Normalitas

Gozali (2011) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data mendistribusikan normal atau mendekati normal seperti tabel berikut:

**Tabel 4.7.3. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test**

|                          |                | Unstandardized Residual |
|--------------------------|----------------|-------------------------|
| N                        |                | 52                      |
| Normal Parameters        | Mean           | ,0000000                |
|                          | Std. Deviation | 1,52371273              |
| Most Extreme Differences | Absolute       | ,096                    |
|                          | Positive       | ,076                    |
|                          | Negative       | ,096                    |
| Test Statistic           |                | ,096                    |
| Asymp. Sig (2-tailed)    |                | ,200                    |

- Test distribution is Normal
- Calculated from data
- Lilliefors significance correction
- This is a lower bound of the true significance

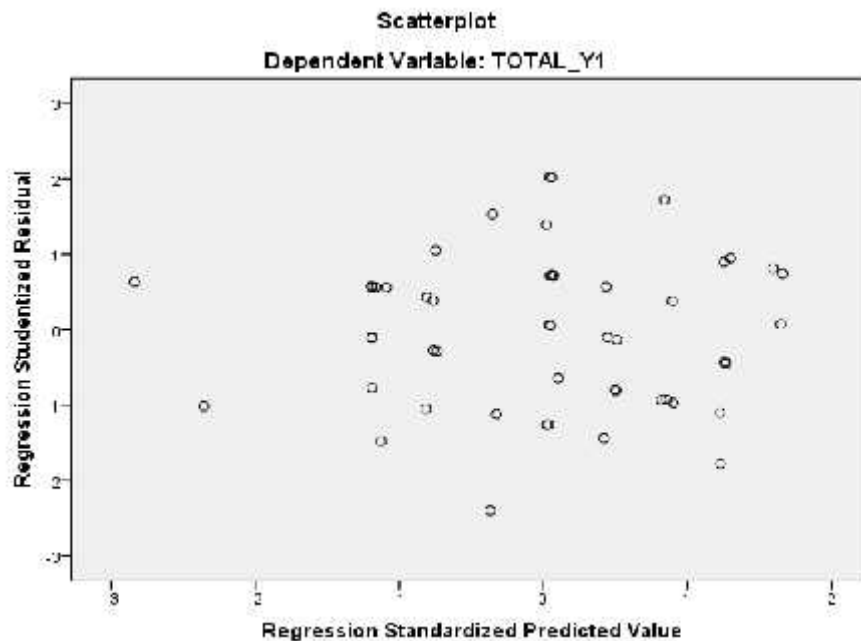
Dari Tabel 4.7.3 di atas dapat dilihat bahwa variabel dependen dan independen memiliki data yang berdistribusi normal. Dari ketiga variabel ini memiliki Asym Sig. 200 di atas 0,05 maka data ini layak untuk digunakan untuk penelitian karena nilai signifikan di atas 0,05

#### **4.7.4 Uji Asumsi Klasik**

##### **4.7.4.1 Uji Heterokedastisitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian di lakukan dengan uji *Gleser*. Berdasarkan tabel 4.7.3.2. dapat di ketahui bahwa tingkat signifikan variabel bebas 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi pada penelitian ini. Berikut ini adalah uji heterokedastisitas untuk varibel bebas:

**TABEL 4.7.3.2**  
**Uji Heterokedastisitas**



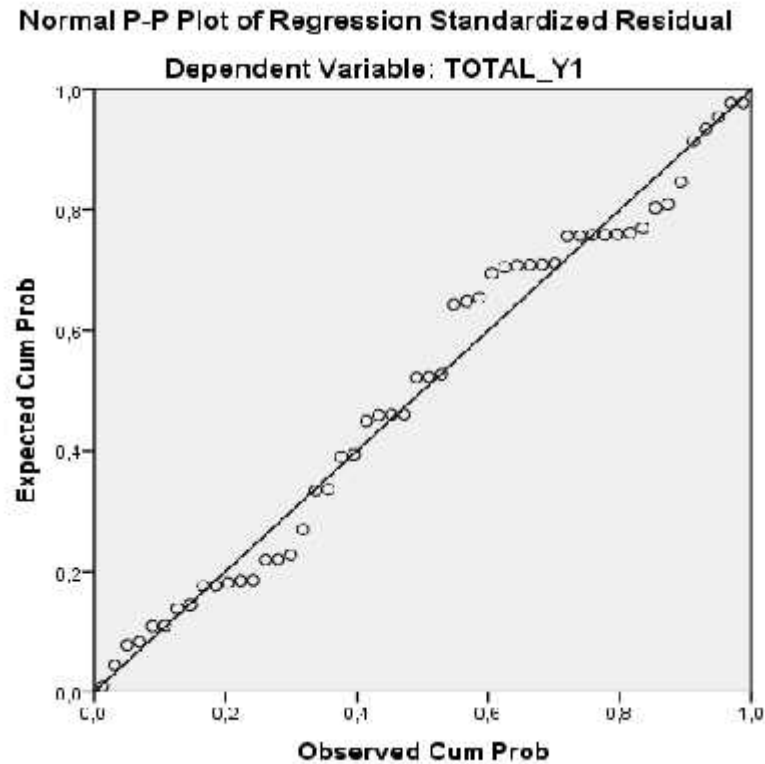
Sumber: Data di olah SPSS 2019

Tabel di atas dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar secara merata di atas dan di bawah garis nol, tidak berkumpul di suatu tempat, tidak membuat pola tertentu sehingga dapat disimpulkan uji regresi ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

#### 4.7.4.3 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bermakna (kolerasi) antara setiap variabel bebas dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi kolerasi di antara variabel bebas. Berikut ini hasil uji multikolineritas:

**TABEL 4.7.3.4**  
**UJI MULTIKOLINEARITAS**



Berdasarkan tampilan grafik normal di atas dapat di simpulkan bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Berdasarkan grafik normal plot menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini kerana memenuhi asumsi normalitas.

#### **4.7.5 Uji Reliabilitas**

Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya di lakukan uji reabilitas di gunakan untuk mengukur kekonsistenan kuesioner dalam mengukur variabel. Suatu kuesioner dapat dikatakan reabel atau handal jika jawaban seseorang (responden) terhadap pernyataan adalah konsiten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,2011).

Pengujian reliabilitas dilakukan item pertanyaan yang telah dinyatakan valid pada pengujian validitas. Untuk menguji reliabilitas digunakan koefisien reliabilitas *cronbach's alpha*. Berikut adalah hasil pengujian reliabilitas masing-masing variabel penelitian:

**TABEL 4.7.4**  
**HASIL UJI RELIABILITAS PENELITIAN**

**Case Processing Summary**

|       |                       | N  | %     |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid                 | 52 | 100,0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0  | ,0    |
|       | Total                 | 52 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

**Reliability Statistics/**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,631             | 4          |

**Item-Total Statistics**

|          | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|----------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL_X1 | 47,25                      | 22,074                         | ,396                             | ,586                             |
| TOTAL_X2 | 46,67                      | 20,303                         | ,588                             | ,414                             |
| TOTAL_X3 | 43,08                      | 26,190                         | ,386                             | ,579                             |
| TOTAL_Y1 | 44,67                      | 31,244                         | ,313                             | ,627                             |

Sumber: Data di olah 2019

Hasil reliabilitas melalui uji statistik *cronbach's alpha* seperti pada tabel 4.7.4 adalah sebesar 0,631, sesuai dengan interpretasi Reliabilitas maka data yang digunakan reliabel sehingga instrumen dapat di gunakan dalam penelitian.

#### 4.7.6 Hasil Analisis Linear Berganda

**TABEL 4.7.5**  
**HASIL ANALISIS REGRESI**

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |                           |       |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|                           |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                         | (Constant) | 12,869                      | 1,903      |                           | 6,762 | ,000 |
|                           | TOTAL_X1   | ,013                        | ,091       | ,021                      | ,139  | ,890 |
|                           | TOTAL_X2   | ,201                        | ,105       | ,325                      | 1,920 | ,061 |
|                           | TOTAL_X3   | -,002                       | ,116       | -,003                     | -,017 | ,987 |

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y1

Sumber: Data di olah 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat di buat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=12,869 + 0,013 X1 + 0,201 X2 - 0,002 X3 + e$$

Artinya apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak terhadap pengaruh pemahaman perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat adalah sebesar 12,869. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak naik satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Barat akan naik sebesar 0,013. Dengan asumsi variabel persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak, persepsi pajak mengenai kriteria wajib pajak patuh dan persepsi wajib pajak atas penerapan sanksi pajak adalah konstan /tidak berubah. Persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak naik satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Barat akan naik sebesar 0,201 dengan asumsi variabel

pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, persepsi wajib pajak atas pengenaan sanksi pajak adalah konstan/ tidak berubah. Persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak turun satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Barat akan turun sebesar 0,002 dengan asumsi variabel pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, persepsi wajib pajak atas pengenaan sanksi pajak adalah berubah.

#### 4.7.7 Hasil Uji t

**TABEL 4.7.6**  
**HASIL UJI PARSIAL**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant) | 12,358                      | 1,892      |                           | 6,531 | ,000 |
|       | TOTAL_X1   | ,008                        | ,088       | ,013                      | ,085  | ,932 |
|       | TOTAL_X2   | ,244                        | ,103       | ,373                      | 2,375 | ,022 |
|       | TOTAL_X3   | ,002                        | ,110       | ,003                      | ,019  | ,985 |

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y1

Sumber: Data di olah 2019

Hasil tabel menunjukkan nilai t hitung dari variabel pemahaman wajib pajak adalah  $0,932 < 0,05$  sehingga pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Nilai t hitung dari variabel sistem pelayanan pajak adalah  $0,022 < 0,05$  sehingga sistem pelayanan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Nilai t hitung dari variabel sanksi perpajakan adalah  $0,985 < 0,05$  sehingga sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

#### 4.7.8 Tabulasi Hasil Pengujian Hipotesis

TABEL 4.7.7

##### Hasil Pengujian Hipotesis

| No | Hipotesis  | Hasil    |
|----|--|----------|
| H1 | Persepsi wajib pajak tentang pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak      | Di tolak |
| H2 | Persepsi wajib pajak tentang sehingga sistem pelayanan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak | Diterima |
| H3 | Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.                 | ditolak  |

Sumber: Data sekunder di olah 2019

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan penelitian yang menyatakan bahwa sistem pelayanan aparat pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak yang terbukti kebenarannya. Namun pada pemahaman perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh pada penggelapan pajak.

#### 4.8 Pembahasan

**H1: Persepsi wajib pajak tentang pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak**

Variabel pengetahuan pajak memiliki arah positif sebesar 0,013 dan nilai t sebesar 0,085 dengan signifikansi sebesar 0,932. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari pada taraf signifikansi 5% ( $0,932 < 0,05$ ), maka **hipotesis**



**1 ditolak.** Artinya pemahaman pajak yang di miliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan hasil kuesioner dapat di ketahui bahwa dari 52 responden wajib pajak pada KPP Pratama Makassar dalam penelitian ini mungkin tidak disetujui dengan pertanyaan yang diajukan mengenai pemahaman pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh karena pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dimana kurangnya seminar dan pelatihan pajak.

Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh prasetyo (2010) bahwa terdapat perbedaan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak semakin baik maka tingkat kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan semakin baik pula. Begitu pula sebaliknya pengetahuan perpajakan yang di miliki oleh wajib pajak masih kurang maka tingkat kepatuhannya juga masih kurang.

**H2: Persepsi Wajib tentang sehingga sistem pelayanan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak**

Variabel pengetahuan pajak memiliki arah positif sebesar 0,373 dan nilai t sebesar 2,375 dengan signifikansi sebesar 0,022. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari pada taraf signifikansi 5% ( $0,022 < 0,05$ ), maka **hipotesis 1 diterima.** Artinya sistem pelayanan pajak yang di miliki oleh wajib pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan hasil kuesioner dapat di ketahui bahwa dari 52 responden wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Barat dalam penelitian ini setuju dengan pertanyaan yang diajukan mengenai sistem pelayanan perpajakan yang dimiliki oleh wajib

pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan pajak sangat penting oleh wajib pajak.

Dengan demikian kenaikan atau penurunan persepsi wajib pajak mengenai sistem pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak pada KPP Pratama Makassar Barat. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahman (2013) yang menghasilkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sistem pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Menurut peneliti, hal ini dapat disebabkan adanya keterbatasan waktu, perubahan peraturan perpajakan, perbedaan persepsi tiap responden dan lingkungan penelitian.

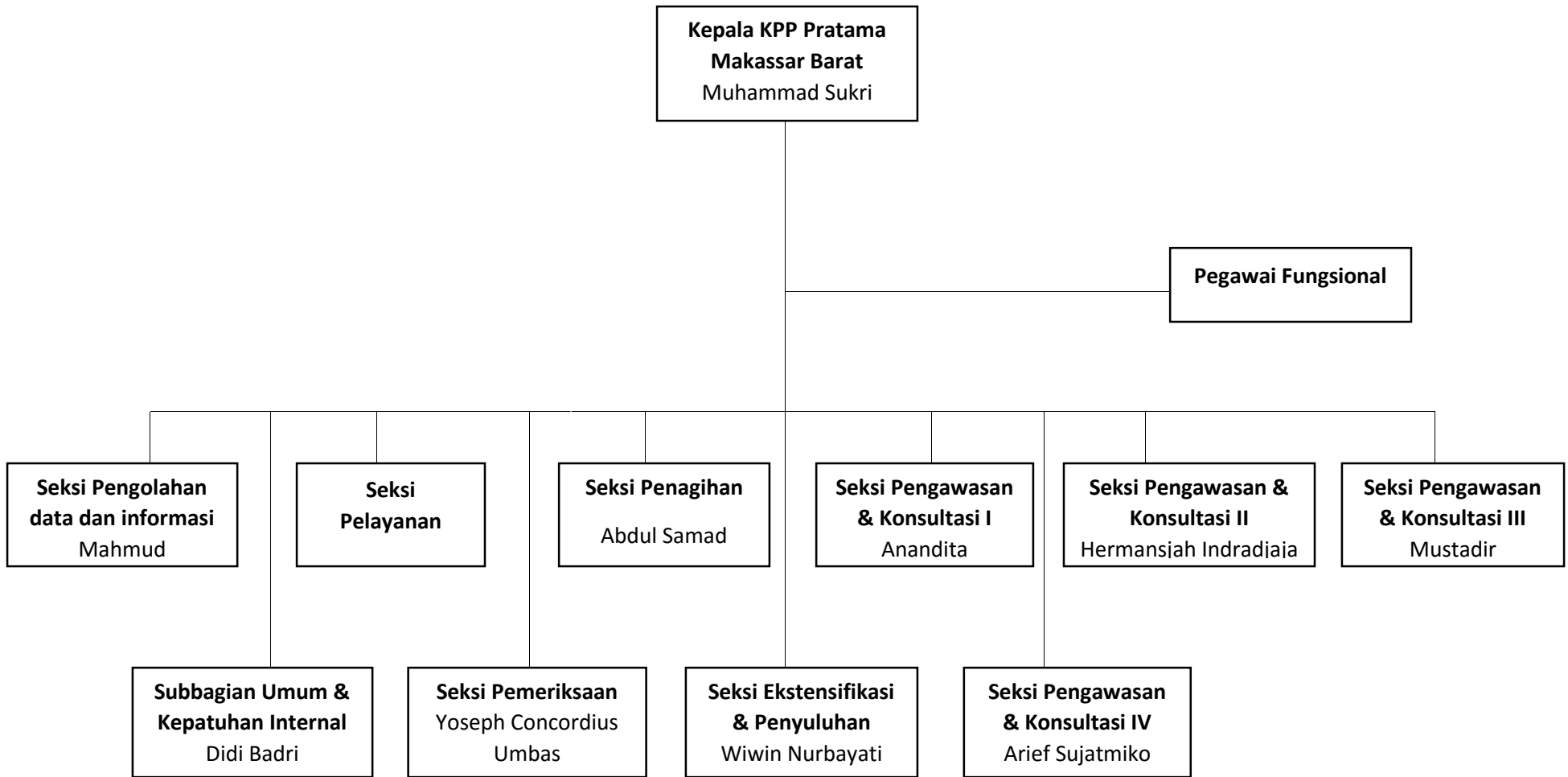
**H3: Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.**

Variabel pengetahuan pajak memiliki arah positif sebesar 0,003 dan nilai t sebesar 0,019 dengan signifikansi sebesar 0,985. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari pada taraf signifikansi 5% ( $0,985 < 0,05$ ), maka **hipotesis 1 ditolak**. Artinya sanksi pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan hasil kuesioner dapat diketahui bahwa dari 52 responden wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Barat dalam penelitian ini mungkin tidak disetujui dengan pertanyaan yang diajukan mengenai sanksi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tentang pajak dianggap agak kurang penting oleh wajib pajak. Dengan demikian kriteria wajib pajak kemungkinan kurang patuh pada sanksi yang telah ditentukan oleh pemerintah begitu sulit untuk dijalankan. Namun hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Prasetyo (2010) yang menghasilkan

bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini di sebabkan adanya perubahan aturan perpajakan, sistem pengendalian internal wajib pajak yang bermain dan kondisi keuangan wajib pajak badan.

### 4.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

#### STRUKTUR ORGANISASI



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Makassar Barat

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Makassar Barat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Persepsi wajib pajak tentang pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.
2. Persepsi wajib pajak tentang pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap perilaku penggelapan pajak
3. Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan yang berat tidak berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak.

#### **5.2 Implikasi**

Adanya kasus penggelapan pajak ini memberikan kerugian besar bagi pendapatan Negara. Oleh karena itu implikasi dari hasil penelitian ini adalah:

1. Menindak tegas semua pelaku penggelapan pajak karena di lihat dari persepsi wajib pajak tidak setuju terhadap berbagai bentuk penggelapan pajak
2. Keberhasilan dalam menangani kasus penggelapan pajak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak yang dipungut dari mereka sehingga masyarakat akan lebih pro-aktif sebagai wajib pajak

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak di wilayah Makassar khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat
2. Jumlah sampel dalam penelitian ini hanya 52 responden
3. Pengukuran instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga adanya kemungkinan responden menjawab pertanyaan dengan tidak jujur.

### **5.4 Saran**

Adanya berbagai kekurangan maupun keterbatasan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Peneliti sebaiknya tidak terbatas pada wilayah Makassar, sehingga hasil penelitian dapat di generalisasikan di wilayah-wilayah yang lain
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas penelitian dengan meningkatkan jumlah responden penelitian serta memperluas jangkauan objek penelitian sehingga hasil penelitian dapat lebih di generalisasikan di daerah-daerah yang lain
3. Bagi penelitian lain diharapkan untuk menggunakan tambahan metode pengumpulan tambahan selain kuesioner untuk mendapatkan data yang lebih valid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Aditama
- Arum. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Anisa. 2011. *Analisis Etika Penggelapan Pajak di Bandung*: Universitas Widyatama
- Elga, Yosua. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar*. Universitas Fajar Makassar.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Grasindo
- Kurniawati, Meiliana. 2014. *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Indonesia*. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Lubis. 2010. *Akuntansi dan Pelaporan Pajak*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo
- Masyahrul, Tony. 2013. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Grasindo
- Markus, Muda. 2004. *Undang-undang Pusat Terbaru*. Jakarta: PT Gramesia Pustaka Utama
- Muljono, Djoko. 2005. *Akuntnasi Pajak*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, Djoko dan Wicaksono, Baruni. 2010. *Akuntansi Perpajakan*, Yogyakarta: Andi
- Prasetyo, Bambang. 2010. *Pengaruh Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Rahayu. 2010. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Universitas Kristen Petra
- Rahman. 2013. *Pengaruh Regiulitas dan Detection Rate Terhadap Penggelapan Pajak*. Padang: Universitas Negeri padang.
- Suminarsasi, Wahyu. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

- Suartana, I Wayan, 2010. "*Akuntansi Keprilakuan: Teori dan Implementasi*". Penerbit CV. Andi Offset.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Trisnawati, Eka. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang No. 28 Tahun. 2007. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 16. Tahun. 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 29. ( ayat 1). *Tentang Pelayanan Aparat Pajak*
- Waluyo. 2016. *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

Elga Yosua, (2014).

## KUESIONER PENELITIAN

### **Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat**

Mardiasmo (2016) mengatakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah keinginan wajib pajak yang berusaha mengurangi utang pajaknya dengan cara melanggar peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pada umumnya, ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, pengguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung Negara sampai kepada kerjasama dengan aparat perpajakan, suap menyuap dan pemalsuan-pemalsuan

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Oleh karena itu disela kesibukan anda, peneliti memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasinya dalam mengisi kuesioner yang ada, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Nama Peneliti : Tiara Rombe Allo  
No.Stambuk : 1510321088  
Fakultas : Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Universitas : Fajar Makassar

## IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Umur : 1. 15 s/d 20 tahun

2. 21 s/d 30 tahun

3. 31 s/d 40 tahun

4. 41 s/d 50 tahun

5. 51 s/d 60 tahun

6. 61 s/d 65 tahun

7. > 65 tahun

Pendidikan : 1. SMA/Sederajat

4. Strata dua (S2)

2. Diploma

5. Strata tiga (S3)

3. Strata Satu (S1)

Pekerjaan :

## DATA KUESIONER

Setiap pertanyaan berikut hanya membutuhkan satu jawaban, dan pertanyaan dijawab dengan memberikan tanda ( ), dengan kriteria sebagai berikut :

Sangat tidak setuju : 1

Tidak setuju : 2

Netral : 3

Setuju : 4

Sangat setuju : 5

| <b>PEMAHAMAN WAJIB PAJAK (TAX KNOW EDGE)</b> |  |          |          |          |          |          |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>NO</b>                                    | <b>Pertanyaan</b>  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 1  | Penggelapan Pajak dianggap etis meskipun Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai sosialisasi mengenai perpajakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan wajib pajak untuk menghindari etika penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak |          |          |          |          |          |
| 2  | Penggelapan pajak dianggap etis meskipun sistem perpajakan di Indonesia telah menerapkan self assessment system  |          |          |          |          |          |
| 3  | Penggelapan pajak dianggap etis jika setiap wajib pajak tidak memahami bagaimana cara untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan mereka   |          |          |          |          |          |
| 4  | Penggelapan pajak dianggap etis bagi setiap wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi di bidang perpajakan  |          |          |          |          |          |

| <b>SISTEM PELAYANAN PERPAJAKAN (TAX SYSTEM)</b> |   |          |          |          |          |          |
|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>No</b>                                       | <b>Pertanyaan</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 1   | Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang diterapkan bersifat memihak dan tidak adil  |          |          |          |          |          |
| 2   | Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan di Indonesia tidak mampu menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku |          |          |          |          |          |

|   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 3 | Penggelapan Pajak dianggap etis dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia memiliki control yang lemah dalam mendeteksi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak |  |  |  |  |  |
| 4 | Menurut saya, sistem perpajakan di Indonesia sudah bagus, tetapi harus diberikan pengawasan yang lebih ketat baik bagi para pemungut pajak maupun wajib pajak               |  |  |  |  |  |

| <b>SANKSI PERPAJAKAN (SANCTION)</b> |  |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>No.</b>                          | <b>Pertanyaan</b>  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 1                                   | Wajib Pajak akan diberikan sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya               |          |          |          |          |          |
| 2                                   | Wajib Pajak akan di beri sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya   |          |          |          |          |          |
| 3                                   | WP akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar /kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo |          |          |          |          |          |
| 4                                   | WP akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan              |          |          |          |          |          |

| <b>PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION)</b> |   |          |          |          |          |          |
|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>No.</b>   | <b>Pertanyaan</b>   | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
| 1  | Menurut saya, etika penggelapan pajak harus diatasi sendiri mungkin mengingat penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan bagian dari penerimaan yang paling besar. |          |          |          |          |          |

|   |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 2 | Jika kinerja pemerintahan khususnya aparatur perpajakan baik, komunikatif dan inspiratif terhadap masyarakat/WP tidak akan melakukan penggelapan pajak.                         |  |  |  |  |  |
| 3 | Jika sanksi terhadap setiap pelanggaran di bidang perpajakan direalisasikan secara jelas, baik bagi pihak pemungut pajak maupun WP, maka penggelapan pajak tidak akan dilakukan |  |  |  |  |  |
| 4 | Jika kinerja pemerintah khususnya aparatur perpajakan buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana perpajakan, maka masyarakat/WP akan enggan dalam membayar pajak           |  |  |  |  |  |

| Variabel |   |   |   |       |    |   |   |   |       |    |   |   |   |       |    |   |   |   |       |
|----------|---|---|---|-------|----|---|---|---|-------|----|---|---|---|-------|----|---|---|---|-------|
| X1       |   |   |   | Total | X2 |   |   |   | Total | X3 |   |   |   | Total | Y1 |   |   |   | TOTAL |
| 2        | 4 | 4 | 2 | 10    | 4  | 3 | 4 | 4 | 15    | 4  | 3 | 4 | 4 | 15    | 3  | 4 | 3 | 4 | 16    |
| 5        | 3 | 4 | 2 | 15    | 4  | 4 | 4 | 4 | 16    | 4  | 4 | 3 | 3 | 14    | 3  | 4 | 4 | 5 | 16    |
| 3        | 2 | 2 | 3 | 13    | 2  | 3 | 3 | 4 | 12    | 3  | 1 | 3 | 3 | 10    | 3  | 4 | 4 | 3 | 14    |
| 2        | 3 | 4 | 4 | 13    | 4  | 4 | 4 | 4 | 16    | 4  | 5 | 5 | 5 | 19    | 4  | 4 | 4 | 5 | 17    |
| 2        | 3 | 4 | 4 | 13    | 2  | 2 | 2 | 2 | 8     | 2  | 4 | 4 | 4 | 14    | 3  | 3 | 4 | 3 | 13    |
| 4        | 4 | 3 | 4 | 14    | 4  | 3 | 3 | 4 | 14    | 5  | 5 | 5 | 5 | 20    | 5  | 4 | 4 | 4 | 17    |
| 2        | 3 | 4 | 2 | 11    | 3  | 3 | 4 | 4 | 14    | 5  | 5 | 5 | 4 | 19    | 3  | 3 | 4 | 4 | 16    |
| 3        | 1 | 5 | 4 | 13    | 1  | 3 | 2 | 5 | 11    | 4  | 3 | 3 | 4 | 14    | 4  | 4 | 5 | 3 | 16    |
| 4        | 2 | 3 | 3 | 12    | 3  | 3 | 3 | 3 | 12    | 4  | 5 | 5 | 4 | 18    | 3  | 4 | 4 | 5 | 16    |
| 1        | 1 | 2 | 2 | 6     | 1  | 2 | 1 | 3 | 7     | 3  | 3 | 4 | 4 | 14    | 3  | 4 | 4 | 4 | 15    |
| 1        | 2 | 3 | 4 | 10    | 3  | 2 | 3 | 3 | 11    | 3  | 4 | 4 | 4 | 15    | 3  | 4 | 3 | 5 | 15    |
| 2        | 2 | 2 | 4 | 10    | 3  | 5 | 2 | 2 | 12    | 3  | 3 | 3 | 3 | 12    | 3  | 4 | 4 | 5 | 16    |
| 2        | 3 | 3 | 2 | 10    | 3  | 3 | 2 | 3 | 11    | 4  | 4 | 4 | 5 | 17    | 3  | 4 | 4 | 4 | 15    |
| 2        | 2 | 3 | 3 | 10    | 2  | 3 | 3 | 3 | 11    | 4  | 4 | 5 | 5 | 18    | 3  | 3 | 3 | 5 | 14    |
| 2        | 2 | 4 | 3 | 11    | 2  | 4 | 2 | 3 | 11    | 4  | 4 | 4 | 5 | 17    | 4  | 3 | 4 | 3 | 14    |
| 4        | 3 | 4 | 4 | 13    | 4  | 4 | 5 | 5 | 18    | 5  | 5 | 4 | 4 | 18    | 5  | 4 | 4 | 5 | 18    |
| 4        | 4 | 5 | 5 | 18    | 4  | 4 | 5 | 5 | 18    | 5  | 5 | 5 | 5 | 20    | 5  | 4 | 3 | 4 | 16    |
| 4        | 5 | 4 | 4 | 17    | 4  | 4 | 5 | 5 | 18    | 5  | 5 | 5 | 5 | 20    | 4  | 4 | 4 | 5 | 17    |
| 2        | 3 | 4 | 4 | 13    | 4  | 4 | 3 | 3 | 14    | 5  | 5 | 4 | 4 | 18    | 5  | 5 | 5 | 4 | 19    |
| 3        | 2 | 3 | 4 | 12    | 4  | 3 | 5 | 5 | 17    | 4  | 4 | 5 | 5 | 18    | 4  | 3 | 3 | 5 | 15    |
| 2        | 3 | 3 | 2 | 10    | 4  | 4 | 5 | 5 | 18    | 5  | 5 | 3 | 4 | 17    | 4  | 4 | 5 | 5 | 18    |
| 2        | 4 | 4 | 4 | 14    | 4  | 5 | 4 | 4 | 17    | 5  | 5 | 4 | 5 | 19    | 4  | 4 | 3 | 5 | 16    |
| 3        | 4 | 4 | 3 | 14    | 4  | 5 | 5 | 4 | 18    | 4  | 4 | 5 | 5 | 18    | 4  | 4 | 5 | 4 | 17    |
| 4        | 4 | 3 | 2 | 13    | 4  | 3 | 4 | 4 | 15    | 4  | 5 | 5 | 5 | 19    | 5  | 4 | 4 | 3 | 16    |
| 2        | 3 | 4 | 4 | 13    | 3  | 4 | 4 | 3 | 14    | 5  | 4 | 5 | 5 | 19    | 4  | 5 | 4 | 4 | 18    |

|   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|
| 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 3 | 4 | 4 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | 4 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 9  | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 19 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |





| Pendidikan       | Pekerjaan      | Jenis Kelamin |   |
|------------------|----------------|---------------|---|
|                  |                | P             | L |
| Strata satu (S1) | Pegawai Swasta |               | √ |
| Strata satu (S1) | Pegawai swasta | √             |   |
| SMA /Sederajat   | Pegawai Swasta |               | √ |
| SMA/Sederajat    | Wiraswasta     | √             |   |
| Strata Satu (S1) | Wiraswasta     |               | √ |
| SMA/Sederajat    | Wiraswasta     |               | √ |
| Strata Satu (S1) | Pegawai Swasta |               | √ |
| Strata Satu (S1) | Pegawai Swasta | √             |   |
| Strata Satu (S1) | Wiraswasta     | √             |   |
| Strata Satu (S1) | Wiraswasta     | √             |   |
| SMA/Sederajat    | Wiraswasta     | √             |   |
| SMA/Sederajat    | Wiraswasta     |               | √ |
| SMA/Sederajat    | Wiraswasta     | √             |   |
| Strata satu (S1) | Pegawai Swasta | √             |   |
| Diploma          | Pegawai Swasta |               | √ |
| Strata satu (S1) | Wiraswasta     | √             |   |
| Strata satu (S1) | PNS            | √             |   |
| Strata satu (S1) | PNS            | √             |   |
| Strata satu (S1) | Pegawai Swasta |               | √ |
| Strata satu (S1) | Pegawai Swasta |               | √ |
| Diploma          | PNS            | √             |   |
| Diploma          | PNS            |               | √ |
| Strata satu (S1) | Wiraswasta     |               | √ |
| Diploma          | Wiraswasta     |               | √ |
| Diploma          | Wiraswasta     | √             |   |
| Strata Satu      | PNS            | √             |   |
| SMA/Sederajat    | Wiraswasta     |               | √ |
| SMA/Sederajat    | Wiraswasta     | √             |   |
| Strata Dua (S2)  | PNS            | √             |   |
| Strata Satu (S1) | Pegawai Swasta | √             |   |
| Diploma          | Wiraswasta     | √             |   |
| SMA/Sederajat    | Wiraswasta     |               | √ |
| Diploma          | Pegawai Swasta |               | √ |
| Strata satu (S1) | Wiraswasta     |               | √ |
| Strata Dua (S2)  | Wiraswasta     |               | √ |
| SMA/Sederajat    | Wiraswasta     |               | √ |
| Strata satu (S1) | Wiraswasta     | √             |   |
| Strata satu (S1) | Pegawai Swasta | √             |   |
| Diploma          | Wiraswasta     | √             |   |
| Diploma          | Wiraswasta     |               | √ |

|                  |                |   |   |
|------------------|----------------|---|---|
| Strata satu (S1) | Pegawai Swasta |   | √ |
| SMA/Sederajat    | Wiraswasta     |   | √ |
| SMA /Sederajat   | Wiraswasta     |   | √ |
| Strata satu (S1) | Pegawai Swasta |   | √ |
| Diploma          | PNS            | √ |   |
| Strata satu (S1) | Pegawai Swasta | √ |   |
| SMA/Sederajat    | Wiraswasta     |   | √ |
| Strata satu (S1) | Pegawai Swasta | √ |   |
| SMA /Sederajat   | Wiraswasta     |   | √ |
| Diploma          | PNS            |   | √ |
| Strata satu (S1) | Pegawai Swasta |   | √ |
| Strata satu (S1) | Pegawai Swasta |   | √ |
| Diploma          | Pegawai Swasta | √ |   |

**SITUASI WAJIB PAJAK MENGGISI KUESIONER PADA KPP PRATAMA  
MAKASSAR BARAT**



**Descriptives**  
**Descriptive Statistics**

|                    | N  | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| TOTAL_X1           | 52 | 6       | 19      | 13,31 | 2,712          |
| TOTAL_X2           | 52 | 7       | 18      | 14,35 | 2,619          |
| TOTAL_X3           | 52 | 10      | 20      | 17,48 | 2,174          |
| TOTAL_Y1           | 52 | 12      | 19      | 15,88 | 1,617          |
| Valid N (listwise) | 52 |         |         |       |                |

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics |          |     |     |               | Durbin Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
|       |                   |          |                   |                            | R Square Change   | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |               |
| 1     | ,334 <sup>a</sup> | ,112     | ,056              | 1,571                      | ,112              | 2,014    | 3   | 48  | ,125          | 2,609         |

a. Predictors: (Constant), TOTAL\_X3, TOTAL\_X1, TOTAL\_X2

b. Dependent Variable: TOTAL\_Y1

**Validitas**

| NO | VARIABEL | R HITUNG | R TABEL | KETERANGAN |
|----|----------|----------|---------|------------|
| 1  | X1       | 0,418    | 0,023   | Valid      |
| 2  | X2       | 0,397    | 0,023   | Valid      |
| 3  | X3       | 0,416    | 0,023   | Valid      |

**ANOVA<sup>a</sup>**

| Model |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | 14,901         | 3  | 4,967       | 2,014 | ,125 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 118,407        | 48 | 2,467       |       |                   |
|       | Total      | 133,308        | 51 |             |       |                   |

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y1

b. Predictors: (Constant), TOTAL\_X3, TOTAL\_X1, TOTAL\_X2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

|                                  |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                |                | 52                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup> | Mean           | ,0000000                |
|                                  | Std. Deviation | 1,52371273              |
| Most Extreme Differences         | Absolute       | ,096                    |
|                                  | Positive       | ,076                    |
|                                  | Negative       | -,096                   |
| Test Statistic                   |                | ,096                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)           |                | ,200 <sup>c,d</sup>     |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

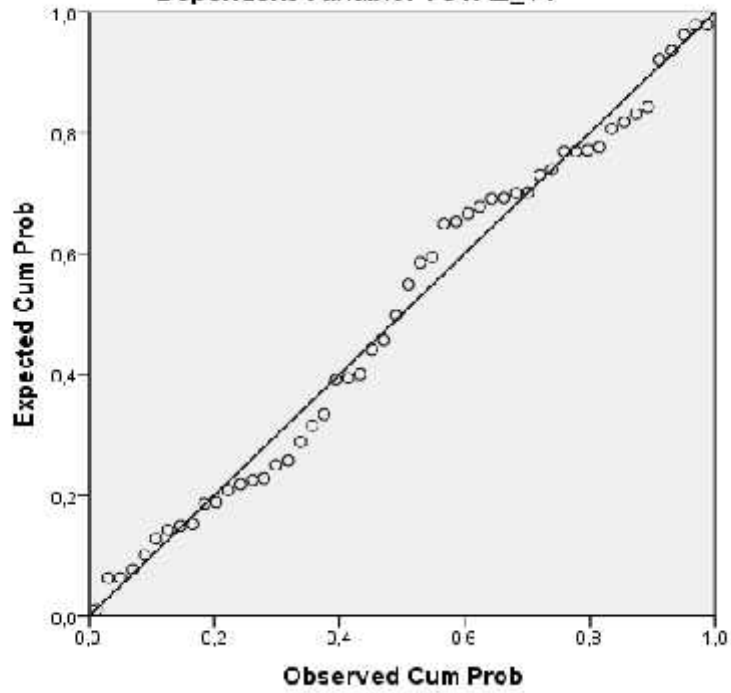
#### Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1     | (Constant) | 12,358                      | 1,892      |                           | 6,531 | ,000 |
|       | TOTAL_X1   | ,008                        | ,088       | ,013                      | ,085  | ,932 |
|       | TOTAL_X2   | ,244                        | ,103       | ,373                      | 2,375 | ,022 |
|       | TOTAL_X3   | ,002                        | ,110       | ,003                      | ,019  | ,985 |

a. Dependent Variable: TOTAL\_Y1

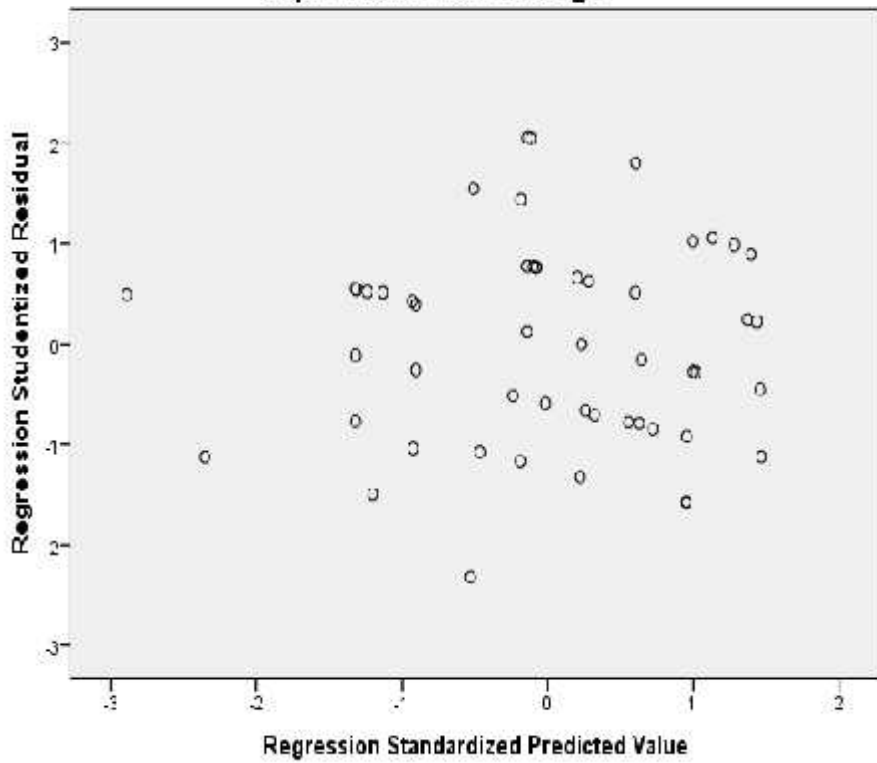
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: TOTAL\_Y1



Scatterplot

Dependent Variable: TOTAL\_Y1



### Correlations

|          |                     | TOTAL_X1 | TOTAL_X2 | TOTAL_X3 | TOTAL_Y1 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| TOTAL_X1 | Pearson Correlation | 1        | ,418**   | ,254     | ,169     |
|          | Sig. (2-tailed)     |          | ,002     | ,069     | ,230     |
|          | N                   | 52       | 52       | 52       | 52       |
| TOTAL_X2 | Pearson Correlation | ,418**   | 1        | ,416**   | ,379**   |
|          | Sig. (2-tailed)     | ,002     |          | ,002     | ,006     |
|          | N                   | 52       | 52       | 52       | 52       |
| TOTAL_X3 | Pearson Correlation | ,254     | ,416**   | 1        | ,161     |
|          | Sig. (2-tailed)     | ,069     | ,002     |          | ,254     |
|          | N                   | 52       | 52       | 52       | 52       |
| TOTAL_Y1 | Pearson Correlation | ,169     | ,379**   | ,161     | 1        |
|          | Sig. (2-tailed)     | ,230     | ,006     | ,254     |          |
|          | N                   | 52       | 52       | 52       | 52       |

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Case Processing Summary

|       |                       | N  | %     |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid                 | 52 | 100,0 |
|       | Excluded <sup>a</sup> | 0  | ,0    |
|       | Total                 | 52 | 100,0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| ,631             | 4          |

### Item-Total Statistics

|          | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|----------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| TOTAL_X1 | 47,25                      | 22,074                         | ,396                             | ,586                             |
| TOTAL_X2 | 46,67                      | 20,303                         | ,588                             | ,414                             |



|          |       |        |      |      |
|----------|-------|--------|------|------|
| TOTAL_X3 | 43,08 | 26,190 | ,386 | ,579 |
| TOTAL_Y1 | 44,67 | 31,244 | ,313 | ,627 |